



KEKERASAN DI MYANMAR DAN MENGAPA HAL ITU TERJADI

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 2 (2017)

Analisis Hubungan Internasional merupakan esai sebagai bentuk respon atau pemikiran dalam mengamati isu-isu kontemporer hubungan internasional terkini.

hi.fisip.unsoed.ac.id

[@hiunsoed](https://www.instagram.com/hiunsoed)

Dengan merangkum beberapa laporan dari lembaga non-pemerintah internasional (*Human Rights Watch, Amnesty International*), pemerintahan Myanmar, dan media (*BBC, Al-Jazeera, CNN, The Guardian*), maka ada beberapa hal yang kita ketahui saat ini mengenai kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar saat ini.

Pertama, pada awal bulan Agustus, pemerintah meningkatkan pengamanan di wilayah Rakhine untuk mencegah berkembangnya ekstrimisme di wilayah Pegunungan May Yu, dengan menurunkan lebih banyak tentara dan menerapkan jam malam. Kedua, pada Jumat 25 Agustus lalu telah terjadi serangan pada polisi perbatasan oleh kelompok mengatasnamakan gerilyawan Rohingya dan menewaskan 59 gerilyawan dan 12 aparat kepolisian (laporan lain dari *The Guardian* mengatakan total korban jiwa lebih dari 100 orang). Ketiga, terdapat laporan dari *Human Rights Watch* bahwa terdapat beberapa titik kebakaran di wilayah Rakhine. Yang paling awal adalah kebakaran pada tanggal 25 Agustus di jalur Desa Zay Di Pyin dan Koe Tan Kauk di Rathedaung. Kemudian pada tanggal 28 Agustus ditemukan beberapa titik lagi, termasuk di kota Maungdaw. Belum bisa dipastikan penjelasan untuk pembakaran ini karena pemerintah menuding ini adalah ulah gerilyawan. Keempat, hingga tulisan ini dibuat, lebih dari 30,000 orang telah melarikan diri ke Bangladesh. Dari berbagai laporan yang ada, pengungsi mengungkapkan bahwa telah terjadi kekerasan dan pembakaran di desa-desa mereka (*BBC, 2017; Human Rights Watch, 2017; Al-Jazeera, 2017; The Guardian, 2017*).

Human Rights Watch menyebutkan bahwa pembakaran tahun ini memiliki kemiripan dengan kekerasan yang terjadi terhadap orang Rohingya pada tahun 2016. Masalah tahun 2016 diawali serangan oleh kelompok militan Rohingya Harakah Al Yaqin (sekarang Arakan Rakhine State Army) yang dibalas dengan "Operasi Pembersihan" oleh pemerintah mulai Oktober 2016 hingga Maret 2017. Kemudian dilaporkan bahwa operasi melibatkan tindakan kekerasan dan pemerkosaan, walaupun pemerintah menolak mengakui kekerasan telah terjadi. Menurut IOM dan PBB, setidaknya 100,000 orang pengungsi akibat operasi ini (*The Guardian, 2017; BBC, 2017; Amnesty International, 2016*).

Mengapa kekerasan di Myanmar terjadi, dan mengapa tidak berakhir? Bila ditarik lebih jauh ke belakang, kompleksitas hubungan kelompok Rohingya dengan negara telah terbentuk seiring proses pembangunan Negara-Bangsa.

KEKERASAN DI MYANMAR DAN MENGAPA HAL ITU TERJADI

ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL
SERI 2 (2017)

Kelompok minoritas yang disebut Rohingya ini merujuk pada berbagai kelompok etnis yang berbeda, dan telah berada di wilayah Myanmar semenjak kolonialisme Inggris (Chia, 2016). Namun, persepsi bahwa mereka adalah pendatang atau bukan bagian dari bangsa Myanmar telah menjadi retorika pembangunan nasionalisme Myanmar dan melahirkan Undang-undang Kewarganegaraan yang mengeksklusi kelompok Rohingya. Setelah menjadi negara merdeka dan didominasi oleh Rezim Militer, kekerasan politik menjadi bagian dari kehidupan negara. Bahkan setelah Pemilu 2015 dan Myanmar dipimpin oleh Presiden dari partai *National League for Democracy*, militer masih memiliki kekuasaan besar yang dijamin oleh konstitusi sehingga sipil belum memperoleh kontrol atasnya. Militer masih mengontrol Kementerian Dalam negeri, Pertahanan dan Perbatasan, serta 25% kursi di Parlemen.

Pertanyaan selanjutnya lebih sulit lagi, bagaimana mengakhirinya? Sulit, terutama bagi kita yang hanya menyaksikan dari kejauhan dengan pandangan terbatas dan pengetahuan minim atas detail kompleks sistem sosial politik di Myanmar sana. Melempar bom molotov ke Kedutaan Besar Myanmar adalah langkah mundur, dan menarik Dubes Indonesia dari Myanmar sama mundurnya karena justru untuk meningkatkan peran Indonesia baik itu sebagai jalur bantuan ataupun diplomasi disini kita perlu menjaga pintu komunikasi. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya dengan keberangkatan Menlu Retno Marsudi ke Myanmar untuk membangun diskusi dengan pemerintah setempat.

Selanjutnya, kita perlu mengakhiri retorika yang tidak mendukung penyelesaian dari akarnya. Bahwa ini akibat perbedaan etnis atau agama disini tidak bisa dijadikan jawaban tunggal, apalagi ketika justru memperkuat ketegangan horizontal dan menjadi justifikasi kekerasan vertikal. Jawabannya mungkin bukan sekedar membangun toleransi, walaupun pengakuan etnis Rohingya oleh negara adalah awalan yang baik. Saskia Sassen (2017) menuliskan bahwa penting untuk melihat kekerasan ini dalam konteks ekonomi di Myanmar, yakni kepentingan ekonomi penguasa, dalam hal ini kelompok militer. Perlu diperhatikan bahwa pengambilalihan lahan telah lama menimpa petani kecil baik itu dari kelompok Budha maupun Muslim. Kejadian ini meningkat drastis di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing baru tahun 2012 yang mengizinkan 100% investasi asing (Sassen, 2017). Laporan dari *Advisory Commission Rakhine State* yang beranggotakan pemerintah Myanmar dan Kofi Annan Foundation menjabarkan 12 rekomendasi langkah yang harus dilakukan untuk mencapai penyelesaian damai, termasuk di antaranya pembangunan sosial-ekonomi di negara bagian Rakhine. Hambatan yang mungkin dihadapi adalah dominasi militer yang masih menghantui Myanmar. Tanggung jawab yang lebih besar dunia internasional adalah membangun sistem yang tidak memberi fondasi bagi kekuasaan korup di negara-negara berkembang seperti Myanmar.

Nurul Azizah Zayzda
Dosen Hubungan Internasional